

Manajemen Pemerintahan Desa Ciangsana Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes

Alifvia Putri Ramadhina¹, Evi Priyanti²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang

Abstract

Ciangsana Village government management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) needs to be done well so that BUMDes management can contribute to PADes. Without government management in accordance with its functions, it can bring setbacks in village development including BUMDes productivity. The purpose of this study was to determine Ciangsana Village government management in improving BUMDes productivity. This research uses descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used were interviewed, observation, and documentation. Researchers use the theory of government management by George R Terry which has four dimensions, namely: planning, organizing, actuating and controlling. Based on the results of the research, it was found that planning has not been effective and efficient because it has not led to significant changes in the community and the BUMDes itself. Organizing is good with clear management through solidarity and cooperation. The actuating of the Ciangsana Village government carried out for BUMDes has not contributed to the PADes. Controlling is quite good because there are advisors and supervisors. Thus, it can be concluded that the management of Ciangsana Village government in increasing the productivity of BUMDes has not been effective.

Keywords: BUMDes, Productivity, Village Government Management

Pendahuluan

Adanya otonomi daerah membawa salah satu perubahan yang positif dalam pelaksanaan tata pemerintahan, misalnya dengan adanya otonomi daerah membawa kemandirian pada suatu daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya masing-masing. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai bentuk penerapan kebijakan desentralisasi yang memungkinkan setiap daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk mengambil keputusan

sesuai kebutuhan dan kondisi lokal yang mereka hadapi (Nita Yulia Hasanah et al., 2022:11). Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisisensi pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian kebijakan desentralisasi memungkinkan setiap daerah untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan mereka sendiri. Oleh karena itu daerah memiliki kesempatan untuk berkembang dengan adanya otonomi daerah tersebut. Titik berat otonomi daerah diletakan pada tingkatan

*) Corresponding Author

Email : 1910631180004@student.unsika.ac.id

Kabupaten/Kota, secara esensi kemandirian harus dimulai di tingkatan desa yang termasuk tingkat pemerintahan terendah (Rohmah, 2018:2).

Pengertian desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pihak yang melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup desa yakni pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang berkewenangan mengatur dan mengurus kepentingan warga setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional yang terletak di daerah kabupaten (Widjaja, 2003:3).

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang membantunya. Fungsi pemerintah desa salah satunya melakukan pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta pengembangan perekonomian desa (Solekhan, 2014:51).

Dalam upaya membangun desa, pemerintah desa memiliki kewenangan mengelola secara mandiri seluruh aset desa termasuk mengelola sumber pendapatannya untuk kepentingan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menciptakan kemandirian keuangan bagi desa (Kariono et al., 2020:2).

Sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa. Adapun yang termasuk pendapatan asli desa dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana pada pasal 72 bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) termasuk sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari hasil usaha desa. Maryunani (2008:35) memberikan definisi BUMDes sebagai sebuah lembaga usaha desa yang dikelola secara partisipatif bersama pemerintah desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan ekonomi desa dan membentuk keterikatan sosial di antara masyarakat berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk memperkuat ekonomi desa agar sumber pendapatan desa dapat meningkat.

Pemerintah desa harus memainkan peran penting dalam mengelola BUMDes secara efektif untuk memastikan keberhasilannya, dengan mengambil langkah-langkah seperti menyusun strategi yang tepat dan memantau operasional BUMDes agar mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diharapkan. Selain itu dengan melakukan pengelolaan yang baik. Dengan demikian BUMDes dapat menjadi katalisator utama dalam memperkuat perekonomian dan membangun kehidupan sosial yang lebih solid di wilayah desa.

Pengelolaan BUMDes tidak terlepas dari peranan manajemen pemerintahan yang dilakukan pemerintah desa dalam BUMDes itu sendiri. Keterlibatan pemerintah desa merupakan peran yang sentral untuk meningkatkan produktivitas BUMDes, sehingga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan implementasi yang optimal dari manajemen pemerintahan yang menyangkut proses kegiatan yang telah direncanakan, diorganisir, dilaksanakan, dan dikontrol. Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan dan 416 desa (Oktaviani, 2022). Salah satu desa yang berada di Kabupaten Bogor yaitu Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri. Desa Ciangsana memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 28.096 jiwa.

Desa Ciangsana juga mempunyai lembaga yang mengurus kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu BUMDes. BUMDes Mitra Warga Sejahtera Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berdiri pada tahun 2017. Unit usaha yang ada dalam BUMDes Mitra Warga Sejahtera baru bergerak dalam usaha kuliner dan perdagangan umum yakni gas elpiji dan air galon serta loket pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian unit usaha dalam BUMDes Mitra Warga Sejahtera Desa Ciangsana pada awalnya mendirikan usaha warung makan yang diberi nama Saung Bumdes. Namun Saung Bumdes tersebut kini sudah ditutup karena tingginya persaingan di masyarakat.

Selain warung makan yang memiliki kendala, unit usaha kuliner yang ada di BUMdes Mitra Warga Sejahtera yakni dodol dan bandrek khas Ciangsana juga terkendala oleh

kurangnya minat masyarakat terhadap pembelian produk tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya pengembangan dari segi kemasan yang dipakai, untuk kemasan dalam menjual bandrek menggunakan plastik *ziplock* saja dan dodol menggunakan kotak kardus. Selain itu promosi yang dilakukan juga kurang. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya inovasi pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan kreativitas dan cara promosi untuk menjual suatu produk pada BUMDes dan masyarakat di Desa Ciangsana.

Pemberdayaan memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut terdiri dari penetapan langkah-langkah konkret, pengumpulan masukan dari berbagai pihak, dan membuka akses ke peluang-peluang yang dapat membuat masyarakat lebih berdaya (Rodiyah, 2019:571). Dengan demikian melalui pemberdayaan yang baik oleh pemerintah desa memungkinkan desa tersebut memiliki perekonomian yang kuat.

Kendala yang terjadi pada BUMDes di Desa Ciangsana juga didukung oleh ketidakadanya kelebihan geografi desa karena terletak di antara perbatasan wilayah pemukiman kota dengan desa sehingga daerah tersebut tidak memiliki karakteristik yang menonjol dan lebih mengikuti budaya kota. Walaupun berbatasan dengan wilayah kota yang memiliki perkembangan teknologi yang canggih, pemerintah desa dan BUMDes Desa Ciangsana belum bisa memanfaatkan dengan membangun inovasi yang lain. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni

pada pemerintah Desa Ciangsana juga menjadi kendala pemerintah dalam mengoptimalkan manajemen BUMDes disana. Dengan demikian untuk tahun 2022 pemerintah desa tidak memasukan penyertaan modal untuk BUMDes dalam subsidi anggaran.

Dalam hal ini teori dan konsep manajemen pemerintahan sangat penting untuk mengelola pembangunan di Desa Ciangsana, manajemen pemerintahan berfungsi agar organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Selain itu dengan terselenggaranya manajemen pemerintahan sesuai fungsinya maka dapat membawa perubahan yang baik di Desa Ciangsana, sebaliknya jika tidak diimplementasikan sesuai porsinya akan membawa kemunduran dalam pembangunan di desa termasuk produktivitas BUMDes.

Oleh karena itu penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kualitas aparatur desa sehingga tidak ada inovasi program atau unit usaha yang terbaru dalam BUMDes akibatnya ada beberapa program BUMDes yang tidak bertahan lama serta mengalami banyak kendala. Dengan demikian manajemen pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas BUMDes di Desa Ciangsana ini belum memberikan peran yang signifikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Manajemen Pemerintahan Desa Ciangsana Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes menggunakan teori Manajemen Pemerintahan oleh George R Terry.

Penelitian manajemen pemerintahan desa dalam meningkatkan produktivitas BUMDes telah dilakukan sebelumnya oleh

pertama, Nita Yulia Hasanah et al., pada tahun 2022 yang berjudul "Manajemen Pemerintahan Desa Sirnabaya Dalam Meningkatkan Produktivitas Unggulan Bumdesa Jayabaya", hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan pemerintah terhadap BUMDes Sirnabaya dalam meningkatkan produktivitas sudah efektif sesuai empat fungsi manajemen. Kedua, Priyanti et al., pada tahun 2021 dengan judul "Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes (Studi Kasus Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang)", hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan pemerintah terhadap BUMDes di Desa Purwamekar dalam meningkatkan produktivitasnya belum maksimal dan berhenti karena pandemi covid-19 sehingga pengalokasian dana sementara untuk penanganan covid-19. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, lokus penelitian, yang mana pada penelitian ini dilakukan di Desa Ciangsana sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Sirnabaya dan Desa Purwamekar. Kedua, diketahui bahwa pengelolaan BUMDes oleh pemerintah Desa Ciangsana belum efektif sehingga untuk tahun 2022 pemerintah desa tidak memasukan penyertaan modal untuk BUMDes dalam subsidi anggaran, berbeda dengan penelitian sebelumnya pengelolaan BUMDes Sirnabaya berjalan secara efektif dan pengelolaan BUMDes di Desa Purwamekar belum berjalan dan terhenti karena pengalokasian dana untuk pandemi covid-19.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan bagaimana

manajemen pemerintahan Desa Ciangsana dalam meningkatkan produktivitas BUMDes dalam melihat bagaimana dimensi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Urgensi dari penelitian ini karena belum pernah ada penelitian mengenai manajemen pemerintahan Desa Ciangsana dalam meningkatkan produktivitas BUMDes. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa Ciangsana sebagai bahan masukan dan evaluasi agar produktivitas BUMDes di Desa Ciangsana meningkat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana dikatakan Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif diperuntukan mendeskripsi dan menggambarkan fenomena secara mendetail, baik yang bersifat secara alamiah maupun rekayasa manusia, dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman, (1992:35) yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu desa dari 10 desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah Ciangsana. Secara administratif letak Desa Ciangsana sebagai berikut:

Utara	: Desa Bojong Kulur
Selatan	: Desa Nagrak
Timur	: Desa Limusnunggal/ Kali Cileungsi
Barat	: Kelurahan Jatirangga Kota Bekasi/Kali Cikeas

Desa Ciangsana termasuk desa yang dekat dengan kawasan perkotaan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Ciangsana sebanyak 28.096 jiwa yang terdiri dari 14.001 jiwa laki laki dan 14.095 jiwa perempuan dengan jumlah kartu keluarga 7.205.

Luas Desa Ciangsana adalah 861,722 ha yang terbagi 9 Dusun yang terdiri dari 188 RT dan 47 RW. Luas tanah yang ada di desa tersebut diperuntukkan oleh berbagai keperluan, salah satunya jalan, sawah, pemukiman, bangunan umum, perindustrian dan pemakaman. Keadaan tanah di Desa Ciangsana tergolong dalam dataran rendah.

Manajemen pemerintahan Desa Ciangsana dalam meningkatkan produktivitas BUMDes pada saat ini masih belum mempengaruhi perekonomian masyarakat desa secara signifikan. Masih terdapat kendala yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas BUMDes.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen pemerintahan oleh George R Terry (2010) yang memiliki empat dimensi yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengawasan. Hasil penelitian dan pembahasan penulis digabungkan dengan teori sebagai berikut:

Perencanaan Desa Ciangsana Untuk Meningkatkan Produktivitas BUMDes

Perencanaan adalah proses menciptakan suatu kegiatan dalam kerangka waktu tertentu, termasuk tujuan yang ingin dicapai (Subaidi et al., 2019:27). Pemerintah desa selama di dirikannya BUMDes di Desa Ciangsana mengalami beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar BUMDes kedepannya lebih berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ciangsana, dalam rangka meningkatkan produktivitas BUMDes perencanaan yang dilakukan melalui rapat rutin untuk membahas perencanaan BUMDes dengan komisiaris, kepala desa, perangkat desa dan pengawas dalam kurun waktu setahun sekali. Namun pada tahun 2022 pemerintah desa tidak memasukan penyertaan modal dalam subsidi anggaran karena belum ada perencanaan. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan yang cukup ketat pada unit usaha yang ada dalam BUMDes dan didukung kurangnya inovasi dari pemerintah desa.

Perencanaan oleh pemerintah desa terhadap BUMDes saat ini belum sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga belum memiliki hasil yang signifikan karena persaingan cukup ketat. Oleh karena itu dapat dikatakan perencanaan ini kurang baik karena belum menimbulkan perubahan yang signifikan untuk masyarakat serta BUMDes itu sendiri. Sehingga untuk tahun 2022 ini perencanaan hanya pada tahap mengikuti penawaran

pelatihan aparatur desa dengan pelatihan, seminar, dan studi banding. Kemudian tetap menjalankan unit usaha BUMDes dengan menggandeng usaha gas elpiji dan air mineral bersama masyarakat.

Pengorganisasian Desa Ciangsana Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas BUMDes

Membagi pekerjaan di antara anggota kelompok dan menyiapkan ketentuan dalam hubungan yang diperlukan disebut pengorganisasian. Pembagian kerja dalam organisasi ini memerlukan kerjasama yang erat untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Rohmah, 2018:97). Dimana pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ciangsana bersama BUMDes sudah baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ciangsana, pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa bersama BUMDes sudah baik yang dilakukan dengan solidaritas dan kerja sama dari tiap pihak yang ada pada tingkat struktur BUMDes bersama pemerintah desa. Selain itu dalam pengorganisasian ini juga diadakan rapat minimal 1 tahun 2 kali. Dalam pengorganisasian juga sudah terdapat kepengurusan yang jelas sehingga aparatur desa sudah memiliki tanggungjawab terhadap pengorganisasian BUMDes dan membentuk rasa kerja sama untuk meningkatkan produktivitas BUMDes.

Pelaksanaan Desa Ciangsana Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes

Fungsi manajemen yang paling krusial adalah pelaksanaan (*actuating*). Di dalam pelaksanaan (*actuating*) ini berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mencapai tujuan

yang sudah ditetapkan (Rohmah, 2018:101).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ciangsana, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bergerak pada perdagangan umum dan jasa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala mengingat kondisi geografis Desa Ciangsana yang terletak diantara perbatasan wilayah pemukiman kota dengan desa. Sehingga Desa Ciangsana tidak memiliki karakteristik yang menonjol dan lebih mengikuti budaya kota. Oleh karena itu pemerintah desa kesulitan memberikan program atau unit usaha baru yang belum ada di masyarakat. Hal tersebut juga di dukung oleh kurangnya kualitas aparatur yang kurang mumpuni. Meskipun berbatasan dengan wilayah kota yang memiliki perkembangan teknologi yang canggih, BUMDes dan pemerintah desa setempat belum bisa memanfaatkannya dengan membangun inovasi yang lain.

Berdirinya BUMDes sejak pertama kali dibentuk terdapat program atau unit usaha yang tidak bertahan lama. Pelaksanaan BUMDes Mitra Warga Sejahtera Desa Ciangsana pada awalnya dimulai dari mendirikan usaha kuliner yaitu warung makan yang diberi nama Saung Bumdes sebagai program yang pertama kali berjalan. Namun saat ini usaha warung makan tersebut sudah terhenti karena unit usaha ini sudah banyak ditengah tengah masyarakat sehingga tingginya persaingan di masyarakat mengakibatkan ditutupnya warung makan tersebut.

Unit usaha atau program lain yang dilaksanakan yaitu usaha kuliner dodol Ciangsana dan bandrek Ciangsana yang mana dodol dan

bandrek ini merupakan ciri khas kuliner yang ada di Desa Ciangsana. Pelaksanaan dalam unit usaha kuliner dodol dan bandrek Ciangsana ini tidak dalam jangka waktu yang menetap untuk produksinya. Meskipun Desa Ciangsana memiliki alat untuk membuatnya namun pengolahan dodol Ciangsana hanya dilakukan pada moment tertentu saja karena hasil penjualan nya tidak banyak. Sementara bandrek Ciangsana ini terus berjalan tetapi sedikit minat masyarakat untuk membelinya dan hanya dijual dalam wilayah Ciangsana saja. Hal tersebut dikarenakan kreativitas pemerintah desa yang masih kurang dalam pelaksanaan produktivitas BUMDes sehingga belum bisa mengembangkan produk dari sisi kualitas produk, kemasan, dan promosi secara berkala.

Dalam berbagai unit usaha BUMDes ada satu yang paling unggul yaitu loket BUMDes. Loket BUMDes berlokasi di Kantor Desa Ciangsana yang didalamnya melayani kebutuhan pembelian dan pembayaran-pembayaran untuk masyarakat tanpa harus ke minimarket. Di dalam loket BUMDes terdapat pembayaran pajak PBB, pembayaran toko *online*, pembayaran angsuran kredit kendaraan, tagihan PLN, pengadaan alat tulis kantor dan isi uang elektronik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran seperti pajak kendaraan, pemerintah desa bekerja sama dengan *e-Samsat* Jawa Barat sementara untuk pajak PBB pemerintah desa bekerja sama dengan *e-PBB* Kabupaten Bogor.

Berdasarkan proses *actuating* pada setiap unit usaha yang telah dijalankan untuk meningkatkan produktivitas BUMDes, BUMDes Ciangsana merupakan badan usaha

yang berorientasi pada perdagangan umum dan jasa. Namun pelaksanaan unit usaha yang ada selama ini belum memberikan pengaruh yang besar sebagai penggerak ekonomi desa. Hal ini terlihat dari adanya unit usaha yang tutup dan kurangnya kualitas aparatur dalam memberikan inovasi dalam BUMDes.

Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BUMDes di Desa Ciangsana

Kelanjutan tugas dalam memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dinamakan pengawasan. Dalam pengawasan terdapat kegiatan evaluasi dan memperbaiki penyimpangan yang sifatnya tidak baik agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Rohmah, 2018:119).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ciangsana, bahwa dalam pengawasan dari pelaksanaan kegiatan BUMDes di Desa Ciangsana ini kepala desa selaku penanggung jawab BUMDes mengadakan rapat *controlling* yang dilakukan minimal 6 bulan sekali untuk membahas tentang perkembangan BUMDes. Direktur BUMDes per triwulan juga melaporkan neraca perdagangan kepada pemerintah desa agar laporan keuangan dalam BUMDes jelas dan transparansi. Selain itu terdapat penasihat dan pengawas terhadap jalannya BUMDes.

Penasihat dalam program BUMDes adalah kepala desa. Kepala desa selain sebagai penanggung jawab BUMDes juga merupakan penasihat dimana memiliki tugas memberikan bimbingan serta arahan bahkan trobosan baru dalam unit usaha BUMDes. Sementara tugas pengawasan dilakukan oleh sekretaris desa dan ketua BPD yang memiliki

tanggung jawab mengawasi tindakan dan kegiatan BUMDes. Selain itu memperhatikan struktur BUMDes yang sudah dibentuk, dan mengawasi audit anggaran dari kreditor.

Pengawas dan penanggung jawab BUMDes harus saling berkolaborasi untuk mengawasi pengelolaan BUMDes agar tercipta manajemen yang baik. Namun di dalam dimensi pengawasan ini masih terdapat kelemahan yaitu setiap bulannya tidak ada kunjungan dari Kepala Desa dan pengawas BUMDes Desa Ciangsana untuk melakukan evaluasi dengan anggota BUMDes. Maka dari itu menurut penulis dalam pengawasan ini cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi agar produktivitas BUMDes Desa Ciangsana dapat meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian manajemen pemerintahan Desa Ciangsana dalam meningkatkan produktivitas BUMDes dapat dikategorikan belum efektif, berdasarkan empat dimensi manajemen pemerintahan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan (*planning*) yang dilakukan pemerintah desa belum menimbulkan perubahan yang signifikan untuk masyarakat serta BUMDes itu sendiri. Sehingga masih ada program/unit usaha BUMDes yang tutup. Ketidakbertahan lamanya program-program BUMDes di Desa Ciangsana ini dikarenakan SDM aparatur desa yang kurang mumpuni dalam memberikan inovasi program untuk BUMDes. Sehingga perencanaan yang dilakukan di tahun 2022 ialah mengikuti penawaran

pelatihan aparatur desa dengan pelatihan, seminar, dan studi banding. Selain itu tetap menjalankan unit usaha BUMDes dengan menggandeng usaha gas elpiji dan air mineral bersama masyarakat.

Dalam proses pengorganisasian (*organizing*) Pemerintah Desa Ciangsana sudah berjalan dengan baik dilihat dari semua lini pemerintahan sudah memiliki kerjasama yang baik dalam meningkatkan produktivitas BUMDes. Hanya saja perencanaan dari program dan langkah-langkah BUMDes belum maksimal karena kurangnya kualitas aparatur.

Dalam proses pelaksanaan (*actuating*) BUMDes di Desa Ciangsana berorientasi pada perdagangan umum dan jasa. Namun unit usaha yang ada pada BUMDes ada yang tidak bertahan lama. Hal ini karena kondisi geografis Desa terletak diantara perbatasan wilayah pemukiman kota dengan desa sehingga Desa Ciangsana tidak memiliki karakteristik yang menonjol dan lebih mengikuti budaya kota. Kualitas aparatur yang belum mumpuni terkait inovasi dalam BUMDes juga menjadi kendala.

Pada proses pengawasan (*controlling*) BUMDes Ciangsana dikategorikan cukup baik, karena dilakukan pengawasan dari berbagai unsur yang terdiri dari Pemerintah Desa Ciangsana, serta kelembagaan desa yakni BPD. BUMDes Ciangsana selalu mengadakan rapat setiap tahunnya dengan para anggota BUMDes. Namun masih terdapat kelemahan pada tidak adanya kunjungan setiap bulannya dari lembaga pengawas dan kepala desa pada BUMDes.

Konsisten dengan temuan penelitian, penulis merekomendasikan dalam bentuk rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Ciangsana seharusnya membuat peraturan desa dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BUMDes agar pengelolaan BUMDes terarah dan memiliki panduan yang jelas.
2. Diperlukan peningkatan kualitas aparatur agar bisa meningkatkan produktivitas BUMDes.
3. Pemerintah Desa Ciangsana memerlukan penambahan unit usaha dari BUMDes agar pelaksanaan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa.
4. Proses pengawasan yang dilakukan seharusnya bertahap agar jika ditengah jalan terjadi kendala dalam BUMDes dapat teratasi dengan cepat.

Daftar Pustaka

- Kariono, K., Badaruddin, B., Sudarwati, L., & Mardhiyah, A. (2020). Village Business Company's (VBC) development model as a channel for economic and social empowerment in Pulau Kampai Village, Pangkalan Susu District, Langkat Regency, North Sumatera Province, Indonesia. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*. <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1820416>
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV.

- Pustaka Setia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis Terjemahan Tjetjep rohendi rohidi*. Jakarta: UI-Press.
- Nita Yulia Hasanah, Rahmat Hidayah, & Rudyk Nababan. (2022). Manajemen Pemerintahan Desa Sirnabaya Dalam Meningkatkan Produktivitas Unggulan Bumdesa Jayabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5).
- Oktaviani, T. (2022). *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bogor*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/30/02240011/daftar-kecamatan-dan-kelurahan-di-kabupaten-bogor?page=all>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Priyanti, E., Agustin, D. R., Pradani, W. I., & Noviyanti, D. (2021). Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes (Studi Kasus Desa Purwamerkar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang). *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 21(1).
- Rodiyah. (2019). Management of Implementation of Village Government in Empowering Village Enterprises (BUMDes). *UNNES International Conference on Research Innovation and Commercialization 2018, KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i18.4748>
- Rohmah, N. (2018). *Manajemen Badan Usaha Milik DESA (BUMDES) (Studi pada BUMDES di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Subaidi, M., Muchsin, S., & Khoiron. (2019). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Di Dusun Somber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang). *Jurnal Respon Publik*, 13(5).
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Terry, G. R. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada